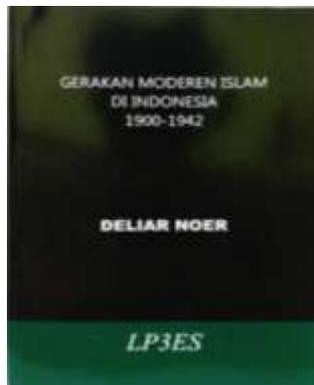


RESENSI BUKU



Judul Buku	: Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942
Penulis	: Deliar Noer
Terbit	: 1994
Halaman	: 315 halaman
ISBN	: -
Penerbit	: LP3ES
Kota	: Jakarta

Arthur Aritonang

Email: arthur.sttcipanas@yahoo.co.id

Alumni Program Pascasarjana di Sekolah Tinggi Teologi Cipanas

Buku ini ditulis oleh Deliar Noer yang merupakan seorang sejarawan dan pemikir Islam. Isi buku merupakan disertasi doktoralnya yang berhasil dipertahankan di Oxford University dan di kemudian hari diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku ini merupakan salah satu buku bacaan sejarah yang direkomendasi oleh pembaca untuk dibaca oleh kalangan akademisi atau peneliti, masyarakat sipil termasuk pemuka agama di Indonesia.

Berbicara mengenai Indonesia tidak terlepas dari peran serta umat Islam sebagai agama yang paling banyak pemeluknya di Indonesia bahkan di dunia. Dengan demikian setiap kali kita ingin melakukan penelitian mengenai hubungan Islam dan Kristen dalam dinamika perpolitikan di Indonesia masa kini, ada baiknya lebih dulu membaca buku ini yang membahas potret sejarah gerakan pembaharuan Islam dalam bidang pendidikan, sosial dan politik sebelum kemerdekaan Indonesia.

Secara umum, isi buku membahas mengenai gerakan pembaharuan Islam di Nusantara pada tahun 1900-1942. Gerakan ini dimulai dari kesadaran bersama para Ulama yang bersumber dari keprihatinan mereka terhadap masyarakat Islam yang mengalami keterbelakangan alias ketertinggalan dari negara-negara Barat yang sudah lebih dulu menjadi negara moderen. Namun secara politik umat Islam ketika itu mengalami hambatan dan tekanan dibawah imperialisme Belanda.

Kondisi yang memprihatinkan ini membuat para Ulama ini berinisiatif untuk merubah kondisi masyarakat Islam di Nusantara menjadi masyarakat Islam yang berpendidikan. Singkatnya, harapan akan perubahan semakin nyata ketika para Ulama ini menyelesaikan studinya dari luar negeri. Para Ulama ini kemudian dikenal sebagai kelompok pembaharuan.

Setibanya di Indonesia kelompok pembaharuan pun kemudian berinisiatif mendirikan lembaga pendidikan/sekolah. Lembaga ini berbeda dengan sekolah pemerintahan milik Hindia-Belanda dimana secara kurikulum tidak ada muatan pelajaran agama Islam, karena

kebijakan pemerintah ketika itu bersikap netral. Hal ini dipengaruhi oleh dampak dari sekularisasi di Barat. Lembaga pendidikan ini mewajibkan masyarakat yang beragama Islam untuk mengenal dan mempelajari agamanya. Selain itu para murid juga dibekali dengan pengetahuan umum dan keterampilan dengan harapan mereka dapat menjadi manusia yang siap untuk bekerja. Namun kehadiran kelompok pembaharuan Islam ini mendapatkan penentangan dari kalangan Islam tradisi, dikarenakan dianggap “menyaingi” Ulama tradisional (hal. 37-51).

Seiring berjalannya waktu, kelompok pembaharuan, berinisiatif mendirikan organisasi keagamaan dalam pergerakan sosial yang cakupan pelayanannya lebih luas yang menyentuh akan aspek: pendidikan, sosial, dakwah, fatwa, dan ekonomi seperti Muhammadiyah (18 November 1912) (hal. 84-95) dan Nahdlatul Ulama (31 Januari 1926) (hal. 241-254), yang seiring waktu organisasi ini kemudian tersebar luas sampai ke daerah-daerah di Nusantara oleh karena organisasi-organisasi tersebut mendapat dukungan penuh oleh masyarakat Islam di Indonesia. Setahun setelah berdirinya organisasi NU pada tahun 1927 didirikannya Majelis Ulama keberadaan Majelis Ulama sebagai wadah perjumpaan silaturahmi di antara para ulama-ulama Nusantara guna untuk memberikan bimbingan terhadap berbagai pertikaian yang terjadi yang bersifat teologis yang umumnya membahas mengenai hukum Islam dengan cara mengeluarkan fatwa agar seluruh masyarakat Muslim wajib mentaatinya (hal. 166-170).

Kemudian, apa perbedaan antara NU dan Muhammadiyah? NU adalah singkatan dari Nahdlatul ‘Ulama yang berarti kebangkitan ‘ulama atau kebangkitan cendekiawan Islam. Organisasi ini diprakarsai oleh KH Hasyim Asy’ari. Sedangkan Muhammadiyah diambil dari nama nabi Muhammad yang berarti orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Organisasi ini berdiri atas prakarsa KH. Ahmad Dahlan. Secara historis, kedua pendiri organisasi Islam tersebut—KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari—sama-sama mendalami ilmu agama di Arab Saudi. Dua tokoh ini mempunyai perbedaan dalam cara berdakwah KH Ahmad Dahlan berasal dari daerah perkotaan dan memilih cara syiar dengan pendidikan perkotaan sedangkan KH Hasyim Asy’ari yang berasal dari Jombang memilih metode pendidikan pesantren sebagai cara dakwahnya.

Keberadaan organisasi keagamaannya nyata-nyatanya belum cukup menghapus penindasan secara politik Belanda atas masyarakat Islam. Maka dibawah kepemimpinan H.O.S Cokroaminoto menggeser pergerakan Sarekat Islam yang semula hanya berfokus terhadap pergerakan ekonomi dan sosial kemudian menjadi sebuah gerakan politik untuk melawan penjajahan Belanda. Kesadaran ini diawali dari pengamatan atas keberhasilan misi Kristen yang mendapatkan dukungan politik dari pemerintah Belanda dan alasan lainnya ialah bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Islam dari imperialisme Belanda. Namun yang terjadi organisasi Sarekat Islam justru mengalami perpecahan dalam induk internalnya oleh karena perbedaan ideologi, pertikaian organisasi interen maupun dalam teologi Islam. Dalam teologinya Sarekat Islam sangat menekankan rasionalisme karena itu organisasi tersebut anti-tradisi dan anti-wibawa ulama sebagai pengemban tradisi (hal. 153-157), sehingga melahirkan partai-partai Islam. Peran partai ini sangat signifikan dikarenakan berusaha mengendalikan kebijakan politik pemerintah Belanda dan berusaha untuk memperjuangkan keadilan bagi umat Islam di dewan perwakilan rakyat di masa pemerintah Hindia-Belanda.

Dengan demikian, dapat dipahami di Indonesia gerakan pembaharuan muncul dalam dua wadah yaitu Sarekat Islam dalam bidang politik, dan yang kedua Muhammadiyah dalam bidang pendidikan dan sosial

Melihat gerakan ini pemerintahan Belanda merasa hal tersebut sebagai ancaman besar, maka dikeluarkanlah kebijakan-kebijakan yang menghambat gerakan Islam di Indonesia. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Belanda ketika itu ialah melakukan pembatasan ketat bagi orang-orang yang akan menunaikan ibadah Haji ke Makah; sebab dalam pandangan Belanda keberanian umat Islam menentang Belanda didorong oleh kerajaan-kerajaan Islam di luar negeri. Pembatasan ini sangat kuat pengaruhnya di Indonesia maka sejak saat itu umat Islam memperkuat diri di bawah bimbingan ulama atau kiai. Bagi Kaum intelektual Islam melihat ini merupakan tindakan yang tidak adil disebabkan pemerintahan Belanda justru mendukung dan memfasilitasi misi Kristen di Nusantara (hal. 183-188). Melihat sikap politik seperti itu umat Islam merasa terluka dengan sikap Belanda, yang mendukung upaya Kristenisasi di daerah-daerah di Nusantara dan sikap Belanda yang mendiskriminasi umat Islam (pribumi) yang menganggap umat Islam memiliki status warga kelas dua) dihadapan mereka (hal. 187-191). Hal tersebut disebabkan karena elite politik Belanda lebih menghormati orang keturunan Chines, Arab dan para misionaris. Bagi Islam kehadiran agama Kristen dianggap sangat “eksklusif” yang tidak berbaur dengan masyarakat Islam.

Seiring waktu ketika itu berlangsungnya peristiwa perang dunia I dan II, Belanda terlibat di dalamnya dikarenakan Jerman bersekutu dengan Turki. Negara Turki yang mayoritas adalah agama Islam yang mendapat dukungan dari negara-negara Islam di dunia. Belanda menjadi sangat ketakutan karena beragam alasan: (1) hubungan antara masyarakat Islam dan Belanda di Nusantara tidak harmonis (2) “identitas agama Islam” justru memperkuat solidaritas masyarakat Islam di seluruh Nusantara ditambah lagi tersebarnya organisasi agama NU dan Muhammadiyah di berbagai daerah di Indonesia (3) adanya strategi untuk merealisasikan *politik hijrah* sikap menjauhkan diri terhadap pemerintahan Belanda (4) keadaan darurat saat kondisi perang dunia I dan II dapat membuat Indonesia berpeluang besar untuk memproklamasikan kemerdekaannya berdasarkan Islam, maka dibuatlah peraturan oleh pemerintahan Hindia-Belanda melarang untuk mengadakan rapat oleh partai Islam maupun organisasi agama Islam. Sementara itu, para politisi Islam seperti Soekarno dan Natsir berdebat mempersoalkan dasar negara/ideologi bangsa Indonesia. Soekarno bersikap untuk tidak setuju menciptakan negara dengan ideologi syariat Islam namun Soekarno memilih sikap nasionalisme yang netral terhadap agama, sedangkan Natsir bersikap untuk membentuk sikap nasionalisme Islam. Natsir berpendapat ketika itu bahwa Islam adalah agama yang menekankan toleransi. Polemik antara kubu nasionalisme (netral agama) dan nasionalisme Islam terus berlanjut sampai detik-detik kemerdekaan Indonesia (hal. 208-315).

Akhir kata, pembaca mengatakan bahwa buku ini adalah buku yang sangat jujur, netral dan terbuka karena mengulas sesuai dengan fakta sejarah terhadap keberadaan Belanda, Kekristenan dan umat Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan. Dan karena itu buku ini hendak mengatakan kepada pembaca bahwa umat Kristen harus belajar dari pengalaman sejarah dan merubah wajah Kekristenan di mata umat Islam yang dahulu disebut sebagai agama asing menjadi Kekristenan yang bersahabat dan berbaur dengan agama lainnya sehingga tidak lagi menjadi agama yang eksklusif di tengah pluralitas masyarakat. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menghilangkan jurang pemisah antara gereja dan masyarakat.